KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kekosongan Hukum di Era Spionase Modern
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Kekosongan Hukum di Era Spionase Modern

Indonesia belum punya aturan tentang antispionase dan intervensi asing. Perangkat hukum di Indonesia juga belum cukup dalam merespons perkembangan spionase dan intervensi asing di era digital.

Elsa Emiria Leba

SUDUT PANDANG

Beberapa negara telah membuat hukum yang mengatur tentang antispionase dan intervensi asing. Banyak pula negara yang belum memiliki aturan itu.

Lewat Penal Code 1810, Perancis menjadi negara pertama yang memiliki hukum modern soal antispionase. Pada 1889, Inggris menyusul membuat aturan perdana soal itu tersebut. Aneka aturan itu terus diperbarui sesuai perkembangan mutakhir.

Negara-negara yang tidak punya aturan jelas soal antispionase, seperti Jepang, kadang disebut "surga spionase". Agen mata-mata asing leluasa berjejak di Jepang, seperti terungkap pada Juli 2026.

Kala itu, Maksim Vladimirovich Filchenkov terungkap menyembunyikan berbagai suku cadang dan perangkat untuk mendukung militer Rusia menyerbu Ukraina. Filchenkov disebut agen badan intelijen militer Rusia, GRU.

Indonesia juga tak punya aturan jelas soal antispionase. Padahal, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, Indonesia jadi sasaran spionase asing. "Kegiatan spionase dan intervensi asing itu bermain di ranah abu-abu, sedah ada dan tidak ada. Namun, dampaknya luar biasa. Makanya perlu ada aturan baru agar kegiatan tersebut dapat kita cegah, terutama yang membahayakan keamanan Indonesia," katanya.

Ia menyampaikan hal itu dalam seminar nasional "Kedaulatan di Garis Depan: Menguhkan Strategi Nasional Menangkal Spionase dan Intervensi Asing" Kamis (27/8/2026) di Jakarta. Seminar diselenggarakan ASEAN Study Center (ASC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

Dalam forum itu, anggota Komisi I DPR, Nurul Qomaril Arifin, mengatakan, ada wacana untuk membuat rancangan undang-undang (RUU) terkait spionase dan intervensi asing. Namun, DPR harus berkoordinasi terlebih dulu agar RUU ini segera dibahas pada tahun depan. Sebab, usulan untuk Program Legislasi Nasional 2027 akan berakhir pada Oktober ini.

"Melihat urgensinya, saya rasa sudah sangat perlu karena tidak ada undang-undang yang berbicara tentang spionase. Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen yang bersinggungan dengan spionase. Namun, pengaturan tersebut tersebar memurut sektor," ujarnya.

Aturan yang menyinggung spionase atau intervensi asing, di antaranya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 1/2024. Namun, lanjut Nurul, perangkat ini tidak memberikan definisi terpadu mengenai spionase, kontraspionase, ancaman asing, spionase siber, dan campur tangan asing.

Kemeskinan dari kekosongan itu tidak terelakkan. Informasi intelijen tidak selalu dapat menjadi alat bukti yang sah. BIN, misalnya, tidak punya mekanisme penanganan khusus atau rantai penegakan hukum pun kerap berhenti sebelum mencapai efek jera.

"Kekosongan hukum ini juga kerentanan strategis yang nyata, bukan cuma risiko hipotesa. Kalau dibiarkan, Indonesia kehilangan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, menindak, dan juga memberikan efek jera terhadap aktivitas intelijen asing modern," tutur Nurul.

Setidaknya 14 negara sudah memiliki hukum antispionase. Menurut Nurul, Indonesia bisa belajar dari negara-negara tersebut, tetapi tetap harus disesuaikannya sesuai kepentingan nasional, seperti Amerika Serikat (UU Spionase 1917), Inggris (UU Keamanan Nasional 2023), serta Australia (UU Spionase dan Intervensi Asing 2018).

Pengalaman Jepang

Di Jepang, pada Maret 2026 diusulkan undang-undang yang mendasari pembentukan dewan intelijen nasional dan badan intelijen nasional. Lembaga itu semacam Mi6 di Inggris atau CIA di Amerika Serikat.

Hanya perlu dua bulan, RUU disahkan dan pada Juli 2026 akhirnya dibentuk Biro Intelijen Nasional (NIB) dengan anggota staf awal 730 orang. Biro bertanggung jawab kepada Dewan Intelijen Nasional yang diketuai Perdana Menteri Jepang.

Sejak kalah Perang Dunia II, Jepang tidak memiliki badan intelijen terpusat seperti NIB. "Kita selama ini mungkin terlalu naif, ya. Kita bisa hidup tanpa itu (aturan antispionase dan badan intelijen nasional)," kata Nobuhiro Aizawa, Guru Besar Kyushu University dan Dekan ERIA School of Government.

Ia mengatakan, Jepang punya sejarah kebebasan sipil yang kuat. Konstitusi Jepang menjamin hak itu. Aturan di Jepang, antara lain, melarang penyadapan dan menjamin kemerdekaan komunikasi.

"Ini salah satu hal di dalam undang-undang dasar Jepang yang sangat kuat. Jadi, walau pun ada teknologinya, pemerintah tidak punya hak untuk memakai itu guna menghindari *freedom of communication*," ujar Aizawa dalam seminar ASC FISIP UI.

Di sisi lain, Jepang terlalu yakin integrasi ekonomi akan membawa kedamaian. Kebijakan luar negeri Jepang sesasi Perang Dunia II selalu berlandaskan itu. "Ternyata tidak seperti itu," katanya.

Reformasi kelembagaan di perlukan di Jepang. Apalagi, di masa sekarang, pemerintah menjadi pemain minoritas dalam ranah spionase hingga keamanan siber. Berbeda dengan dulu kala pemerintah atau negara mendominasi segala hal.

"Pola pikiran zaman dulu, pemerintah akan selalu punya kontrol apa yang bisa *share*, apa yang tidak bisa *share*. Tetapi, sekarang swasta punya kekuatan untuk apa bisa *share*, apa tidak bisa *share* karena teknologinya jauh lebih canggih," ujar Aizawa seraya memekankan kini banyak kegiatan pemerintah harus memakai swasta.

Terlambat antisipasi

Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menambahkan, kedaulatan bukan hanya soal negara. Kedaulatan juga menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial, dan geopolitik. Di era digital, kedaulatan mencakup kemampuan negara melindungi data, infrastruktur strategis, dan keamanan siber.

"Perang sudah berkembang menjadi multidomain, seperti laut, udara, darat, ruang angkasa, ekonomi, dan siber, yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Seberapa siap Indonesia?" Kita baru merasa heboh setelah kejadian. Artinya terlambat," katanya.

Terkait keamanan siber, Indonesia telah mencatat serangan dalam jumlah luar biasa. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, jumlah serangan anomali siber di Indonesia mencapai lebih dari 5,5 miliar serangan pada 2025.

Ardi melanjutkan, bentuk spionase atau intervensi di ranah digital juga semakin beragam. Mata-mata dulu identik dengan upaya menyadap atau mencuri data. Akan tetapi, spionase atau intervensi asing kini mencakup upaya untuk mengubah pola pikir atau proses pengambilan kebijakan dari target (perang kognitif).

"Kehadiran teknologi, terutama akal imitasi (AI) semakin memudahkan. AI memercepat pengumpulan data atau mengubah algoritma yang memengaruhi berbagai hal. Cara pandang kita harus berubah," ujar Ardi.

Di platform-platform media sosial, misalnya, terjadi fenomena *weaponization of content*. Konten-konten menjadi "senjata" yang memengaruhi perilaku masyarakat. "Pertanyaannya, apakah kita sadar? Saya rasa tidak karena kita masih membela kebutuhan atas media sosial," ujarnya.

Ardi sepakat, perangkat hukum di Indonesia belum cukup dalam merespons perkembangan spionase dan intervensi asing di era digital. Bahkan, Indonesia belum mempunyai undang-undang terkait keamanan dan ketahanan siber untuk melengkapi instrumen yang sudah ada. Hukum ini masih mentok dalam bentuk RUU di DPR.

Menyikapi tantangan saat ini, kolaborasi pemerintah, swasta, dan publik untuk meningkatkan ketahanan siber nasional menjadi makin penting. Di samping itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang itu.

"Kepercayaan publik sedang menjadi taruhan. Bukan hanya publik, melainkan juga masyarakat internasional, investor, dan sebagainya yang sedang melihat Indonesia mau ke mana arahnya," kata Ardi.



Vladyslav T salah satu tersangka pengiriman paresl berisi bahan peledak dari Jerman ke Ukraina, memasuki ruang sidang di pengadilan Stuttgart-Stammheim, Jerman, Selasa (18/8/2026). Seminar ASEAN Study Center di Jakarta Kamis (27/8), mengingatkan, banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki aturan untuk menghadapi berbagai kasus spionase modern saat ini.



M Herindra



Nurul Qomaril Arifin



Nobuhiro Aizawa



Ardi Sutedja